



**PENENTUAN POLA SOSIO DEMOGRAFI DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERBASIS PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG)**

***DETERMINING OF SOCIO-DEMOGRAPHIC PATTERNS AND COMMUNITY
WELFARE BASED IN THE OIL PALM PLANTATION SECTOR USING A
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) APPROACH***

Suhartono¹, Heffi Christya Rahayu², Hidayat³, Arfianti Novita Anwar⁴, Febiana Gitya⁵

¹(Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Indonesia)

²⁻⁴(Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia)

⁵(Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Indonesia)

e-mail: tono@ecampus.ut.ac.id¹, heffirahayu@upp.ac.id², hidayatrangkuti86@gmail.com³,
wantdvee@gmail.com⁴, febiditya@gmail.com⁵

Abstrak

Ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah mengacu pada ketidaksesuaian keberadaan sumber daya di masyarakat, termasuk di dalamnya ketimpangan sumber daya alam dan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan petani yang bergantung kepada sektor perkebunan kelapa sawit skala kecil di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menganalisis ketimpangan dengan menggunakan indeks gini. Selain itu, penggambaran kondisi kesejahteraan masyarakat ditampilkan dalam bentuk peta sosial demografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks pendekatan pendapatan mencapai 0,81 dan pendekatan pengeluaran sebesar 0,84. Keduanya menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang tinggi. Peran serta pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat khususnya petani kelapa sawit skala kecil di Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah dapat memberikan intervensi melalui pemberian subsidi pupuk yang disertai dengan keseimbangan kuantitasnya, kepastian upah layak bagi buruh tani, serta penguatan penetapan harga jual sawit.

Kata Kunci: Ketimpangan; Penghasilan; Pola Konsumsi; Sistem Informasi Geografis

Abstract

Regional inequality is referred to the mismatch between existing resources in society, including inequality in natural resources and income. This research explores an Inequality between Oil Palm Smallholder Farmers in Rokan Hulu Regency. This research helps reports the level of community welfare using Gini Ratio. Moreover, the welfare conditions displayed in the form of a socio-demographic map. The research results show that the income approach index value reaches 0.81 and the expenditure approach is 0.84. Both show that there is a high gap on oil palm smallholder farmers especially in Rokan Hulu Regency. Government participation is needed to improve the economic conditions of farming communities, especially oil palm smallholder farmers in Rokan Hulu Regency. The government should intervene by provide fertilizer subsidies balance with fertilizer quantity, guarantee adequate minimum wages for farm workers, and ensure guidelines for determining prices of palm fresh fruit.

Keywords: Inequality; Income; Consumption Pattern; Geographical Information System



PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan daerah dengan luas lahan dan produksi kelapa sawit rakyat terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, luas perkebunan kelapa sawit rakyat di provinsi ini mencapai 1.762.163 hektar dengan total produksi sebesar 4.817.725 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Komoditas kelapa sawit yang menjadi unggulan di Kabupaten Rokan Hulu berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Siradjuddin, 2015). Kenaikan PAD ini berdampak pada pembangunan infrastruktur fisik dan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di daerah dengan dominasi sektor perkebunan kelapa sawit, peningkatan produksi secara langsung mempengaruhi pendapatan keluarga petani dan kesejahteraan mereka (Setyawan, 2021).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur berdasarkan jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan, serta tingkat pendidikan. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung terdorong untuk melakukan diversifikasi usaha guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi lebih stabil dapat memanfaatkan faktor eksternal untuk menciptakan peluang kekayaan (Watete et al., 2016). Padahal, diversifikasi mata pencaharian dapat menambah aset dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang menunjang kehidupan (Alobo Loison, 2015). Namun, dalam praktiknya, jenis pekerjaan sering dikaitkan dengan kelas sosial tertentu di berbagai negara. Misalnya, di Filipina, pekerjaan seperti mengumpulkan kerang, memancing, menjual makanan, serta mengupas abaca umumnya dilakukan oleh rumah tangga dengan daya beli rendah (Lopez & San Juan, 2019). Sementara itu, di Bangladesh, sektor perikanan memiliki dampak yang merata bagi masyarakat (Sadekin et al., 2018). Di India, industri teh telah menciptakan lapangan kerja bagi banyak tenaga kerja dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja (Gayathri & Arjunan, 2010). Sementara di Pakistan, industri kayu hutan dianggap mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Ullah et al., 2021).

Secara nasional, sektor pertanian masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga taraf hidup mereka masih rendah dengan pola konsumsi yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Perubahan struktural dalam perekonomian telah menyebabkan ketimpangan rasio pendapatan antar sektor (Ryan et al., 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor non-pertanian. Namun, pada subsektor tertentu seperti manufaktur dan perdagangan, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan sering kali lebih besar dibandingkan sektor pertanian (Dorosh & Thurlow, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan tidak hanya terjadi antar sektor, tetapi juga dalam efektivitas masing-masing sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan ini diyakini berakar pada permasalahan struktural dalam perekonomian. Pola klasik transformasi ekonomi di negara maju menunjukkan peralihan dari sektor pertanian ke industri, lalu ke sektor jasa (Dartanto et al., 2017). Di negara berkembang, proses ini cenderung berjalan lebih lambat, sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar, baik antara perkotaan dan pedesaan maupun antara negara berkembang dan negara maju. Selain itu, rendahnya pendapatan di daerah pedesaan sering kali disebabkan oleh terbatasnya akses pendanaan melalui retribusi serta tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah.



Selain faktor ekonomi, faktor geografis juga berperan dalam pembangunan ekonomi (Thiede et al., 2020). Di sisi lain, variabel sosial ekonomi dan sosial demografi memiliki korelasi yang erat, bergantung pada konteks wilayah atau individu yang menjadi objek penelitian. Sosial demografi sendiri mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta mobilitas sosial (Mensah, 2012). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan faktor-faktor ini menjadi sangat penting untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi serta kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memutuskan pembaruan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi taraf hidup masyarakat petani, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian di daerah ini.

KAJIAN TEORI

Tingkat Kesejahteraan

Mata pencaharian didefinisikan sebagai sarana, kegiatan, hak, asset yang digapai seseorang dari tindakan pencarian nafkah pada factor alam atau biologis (tanah, air, sumber daya alam, flora, fauna) atau dalam factor sosial (komunitas masyarakat, kesatuan keluarga, peningkatan kualitas sosial, partisipasi, pemberdayaan) demi kesejahteraan manusia (pengetahuan, kemampuan, keterampilan). Oleh karena itu, mata pencaharian dianggap sebagai kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Okumah et al., 2021). Di sisi lain, kemiskinan adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi seluruh dunia dengan enam persen populasi dunia dianggap miskin berdasarkan pendapatan (Christian et al., 2021).

Pola Konsumsi

Pola konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang tahan lama yang mencakup pembelanjaan rumah tangga seperti, kendaraan dan perlengkapan. Barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Serta jasa yang mencakup barang tidak berwujud konkrit, termasuk Pendidikan. Pola pengeluaran konsumsi seseorang atau rumah tangga pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi pangan (makanan) dan konsumsi non pangan (bukan makanan). Penggunaan pendapatan dalam konsumsi sangat menentukan kesejahteraan masyarakat atau keluarga.

Kurva Lorenz

Kurva Lorenz dan Koefisien Gini diperkenalkan sebagai alat untuk menyelidiki dan mengukur variabilitas. Kurva Lorenz menyajikan tampilan grafis dari paparan kumulatif selama jangka waktu yang diinginkan pada umumnya satu tahun (*Ibid*, n.d.). Kurva Lorenz memperlihatkan persentase pendapatan total yang diperoleh berbagai populasi tertentu ketika populasi diurutkan berdasarkan besar kecilnya pendapatan mereka. Biasanya kurva Lorenz yang didapat dari fungsi distribusi teoritis didefinisikan dalam dua persamaan dan distribusi pendapatan diasumsikan memiliki fungsi kepadatan (*Op.Cit*, n.d.). Tujuan dari catatan ini adalah untuk menyajikan definisi alternative dari kurva Lorenz dalam hal kebalikan dari fungsi distribusi teoritis (Ayeb-Karlsson, 2020). Definisi tersebut dalam istilah satu persamaan dan berlaku untuk variable diskrit serta variable kontinu. Contoh diberikan untuk menggambarkan penggunaan rumus.

Indeks Gini

Indeks Gini menyaring suatu data lebih jauh, untuk memberikan ukuran parameter tunggal dari pengelompokan temporal (Muttarak & Lutz, 2017). Indeks Gini pun digunakan sebagai

pengukuran distribusi pendapatan yang paling umum digunakan. Indeks Gini didefinisikan sebagai perbandingan luas daerah di bawah garis diagonal dan di atas kurva Lorenz terhadap luas segitiga yang terbentuk di sisi kanan kurva Lorenz (Haq & Ahmed, 2017)h. Saat kurva Lorenz mendekati garis diagonal yang menunjukkan persamaan sempurna, luas pembilang menjadi lebih kecil, sehingga menurunkan koefisien Gini (Ullah et al., 2021b). Dengan demikian, koefisien Gini yang tinggi menyiratkan ketidaksetaraan yang dalam, dan sebaliknya.

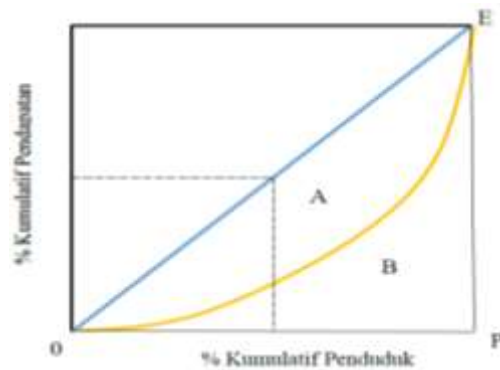
METODOLOGI

Analisis Deskriptif

Data primer merupakan hasil survei mengenai pendapatan dan pengeluaran konsumsi dari masyarakat berdasarkan mata pencaharian sebagai petani perkebunan.

Analisis Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Data yang digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan dengan perhitungan *Gini Ratio* menggunakan data jumlah pendapatan yang diperoleh penduduk dan data jumlah penduduk di wilayah tersebut. Indeks Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode tertentu, sehingga mampu menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara atau wilayah tersebut. Koefisien Gini yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Sehingga koefisien gini atau bilangan gini sering dipakai untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan. Ukuran *Gini Ratio* sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila *Gini Ratio* mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila *Gini Ratio* mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa semakin kecil nilai koefisien Gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin besar nilai koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan.



Rumus Gini Ratio:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$$

Keterangan:

GR = Gini Ratio

F_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i

Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke I

Nilai gini antara 0-1. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna. Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna. Sedangkan untuk mengukur ketimpangan menggunakan Kurva Lorenz karena Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif nasional pada kalangan penduduk. Kurva Lorenz berada pada sebuah bujur sangkar dimana sisi vertical mewakili presentasi kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili presentasi kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan.

Penentuan tingkat kemiskinan ketimpangan Kurva Lorenz dapat dilihat dari jauh dekatnya garis lengkungan terhadap garis diagonal. Karena ketika garis lengkung semakin mendekati garis diagonal artinya distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya jika garis lengkung tersebut semakin menjauh dari garis diagonal maka ketimpangan di daerah tersebut semakin

menjauh dari garis diagonal maka ketimpangan didaerah tersebut semakin parah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan dikatakan semakin merata apabila koefisien gini mendekati nol (0), sedangkan semakin tidak merata distribusi pendapatan nilai koefisien gini semakin mendekati satu (1). Kriteria ketimpangan berdasarkan Koefisien Gini ialah:

1. Nilai 0 – 0,4 ialah tingkat ketimpangan rendah
2. Nilai 0,4 – 0,5 ialah tingkat ketimpangan sedang
3. Nilai lebih dari 0,5 ialah ketimpangan tinggi

Sistem Informasi Geografi (SIG)

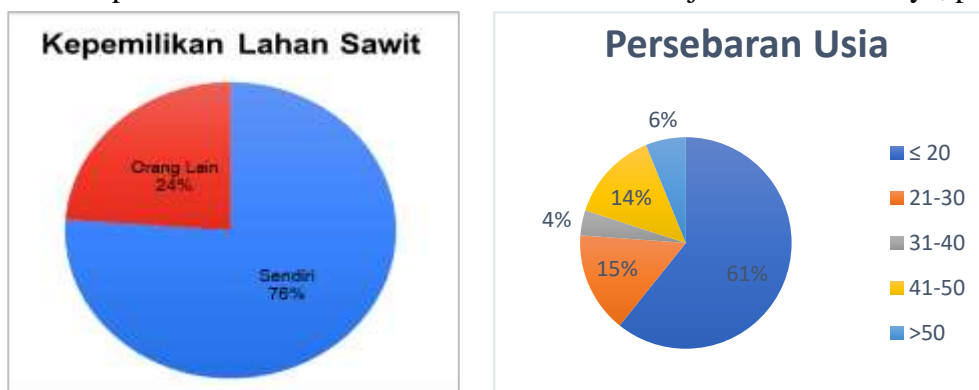
Sistem Informasi Geografi tau Geographic Information System (GIS) merupakan suatu sistem informasi yang berbasis computer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query dan Analisa statistic, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui karakteristik pola penggunaan lahan Kawasan daerah pemetaan sosial demografi. Analisis ini menggunakan alat bantu *software* terutama ArcGIS. Dalam penelitian ini, terdapat satu jenis spasial yang digunakan yakni spasial pemetaan. Spasial pemetaan merupakan penggambaran kondisi eksisting ke dalam peta, sehingga menghasilkan peta sosial demografi di Kabupaten Rokan Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Hasil survei secara online yang dilakukan kepada masyarakat kabupaten Rokan Hulu berjumlah 130 responden. Masyarakat merupakan petani sawit dimana 76% responden merupakan petani sawit pada lahan sendiri sedangkan 24% responden lain merupakan petani sawit milik orang lain. Mayoritas petani sawit di Kabupaten Rokan Hulu menggarap kebun sawit yang merupakan milik sendiri.

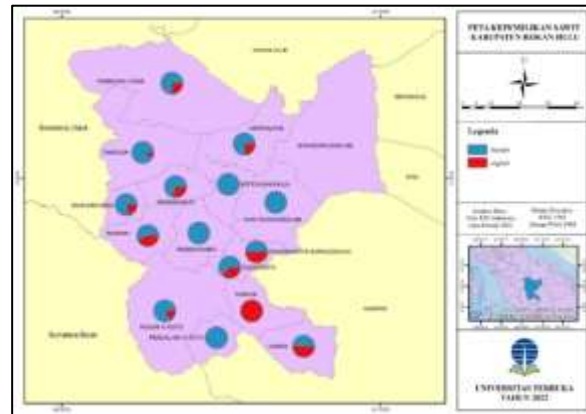
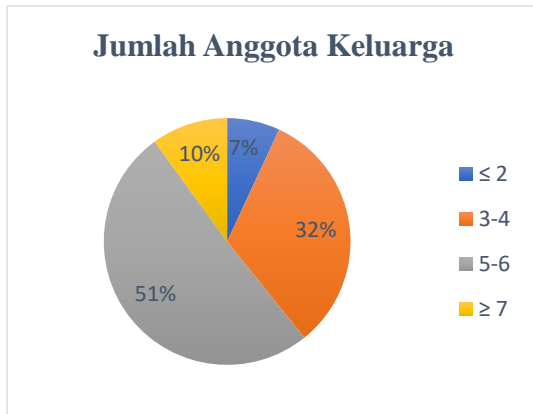
Data responden menyatakan bahwa karakteristik usia petani sawit di Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh petani usia di bawah 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwasanya, petani sawit



sebagian besar merupakan kalangan muda generasi milenial. Data juga menunjukkan bahwa petani sebagian besar merupakan pemilik langsung bagi perkebunan sawit yang digarap.

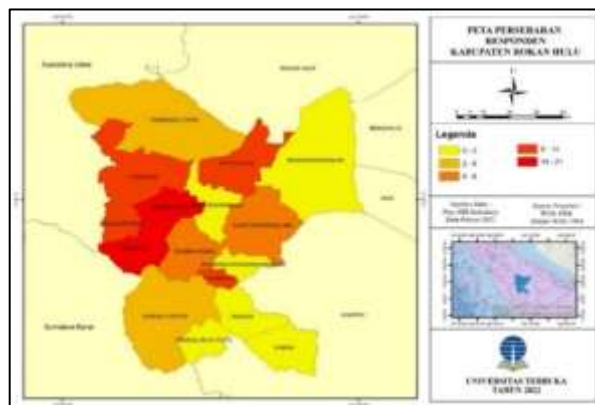
Melalui data yang dikumpulkan, diketahui bahwa jumlah anggota keluarga di setiap keluarga pada responden menunjukkan angka 51 persen untuk keluarga dengan anggota 5-6 orang, 32 persen responden memiliki anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Terdapat 10 persen responden memiliki anggota keluarga lebih dari 7 orang dan terdapat 7 persen responden yang memiliki anggota keluarga kurang dari atau sama dengan 2 orang.

Kepemilikan sawit juga dijelaskan pada persebaran melalui peta. Berdasarkan peta kepemilikan sawit per kecamatan, sebagian besar responden per kecamatan menjawab bahwa status kepemilikan sawit adalah milik sendiri. Kecamatan dengan responden yang sebagian



besar menjawab sawit milik sendiri yaitu Kecamatan Tambusai Utara, Kepenuhan, Tambusai, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Kepenuhan Hulu, Rambah Hilir, Bangunpurba, Rambah, Rambah Samo, Ujungbatu, Rokan IV Koto, dan Pendalian IV Koto. Sedangkan, kecamatan dengan responden yang sebagian besar menjawab status kepemilikan sawit adalah milik orang lain yaitu Kecamatan Tandun, Kabun, dan Pagaran Tapah Darussalam

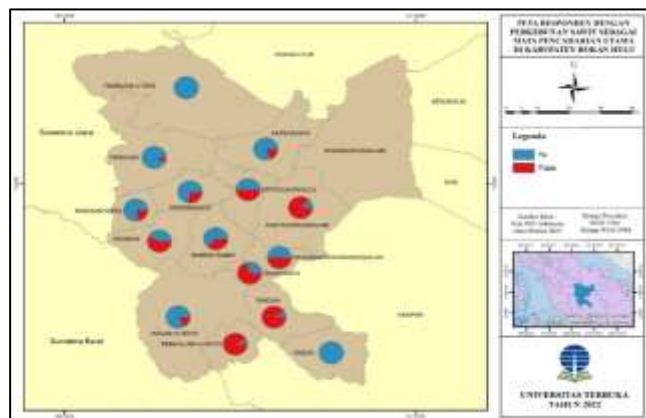
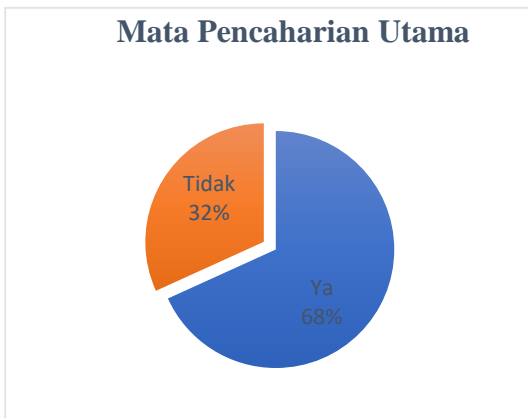
Responden berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Dari total keseluruhan responden, 4 kecamatan terbesar dengan presentase responden pada penelitian adalah kecamatan Rambah dengan besar responden 16 persen, Kecamatan Rambah Hilir dengan 14 persen responden, serta Kecamatan Bangun Purba dan Ujung Batu dengan masing masing kecamatan memiliki 11 persen responden pada penelitian ini. Responden juga berasal dari kecamatan lain yang berada di Kabupaten Rokan Hulu seperti Kecamatan Kepenuhan, Tambusai, Kunto Darussalam, Rambah Samo, dan yang lainnya seperti yang terdapat pada grafik berikut.



Persebaran responden juga dapat dilihat melalui Peta Persebaran Responden di Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan dengan responden terbanyak yaitu di Kecamatan Rambah Hilir dan Rambah dengan rentang 14-21 responden. Sedangkan, responden terkecil yaitu di Kepenuhan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Tandun, Pendalian IV Koto, dan Kabun dengan rentang 0-2 responden. Kecamatan yang tidak ada responden yaitu Kecamatan Bonai Darussalam.

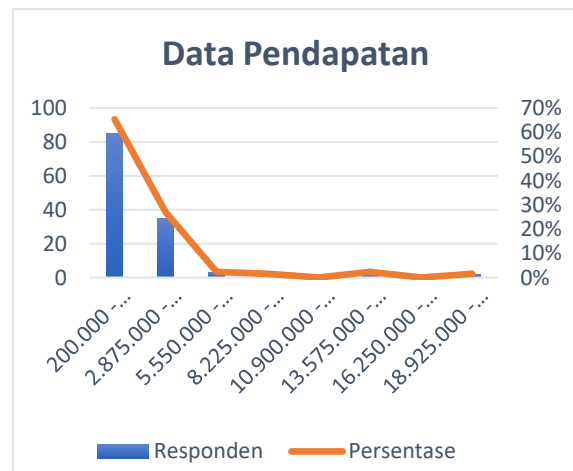
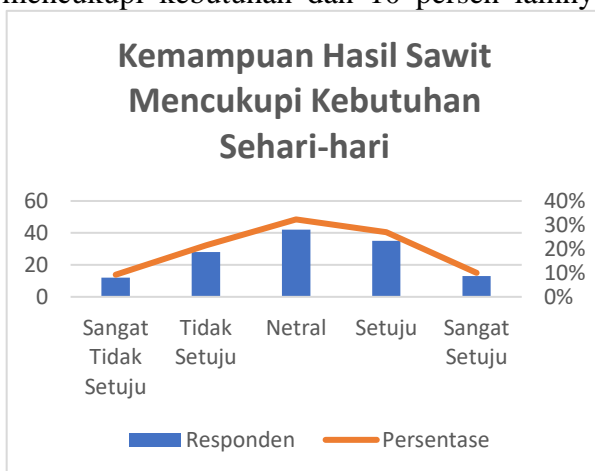
Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagai daerah dengan jumlah perkebunan dan pertanian sawit yang tinggi, penduduk di Kabupaten Rokan Hulu juga bekerja dibidang lain, baik sebagai pekerjaan sampingan maupun pekerja utama. Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 68 persen responden menggantungkan pendapatan dari hasil perkebunan sawit sebagai sumber mata pencaharian. Responden memiliki pekerjaan yang bervariasi yakni pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, PNS, wirausaha dan lainnya.



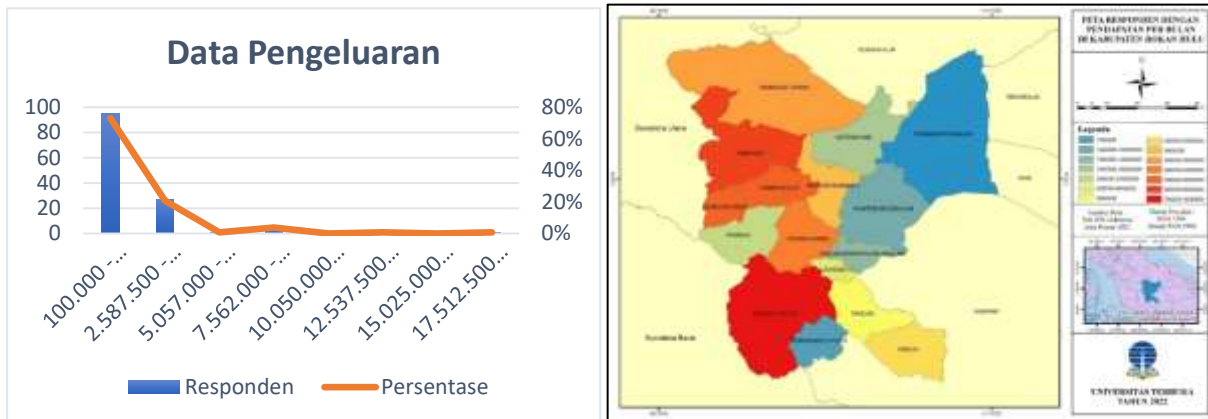
Selain grafik, persebaran responden dengan perkebunan sawit sebagai mata pencaharian utama juga dapat dilihat dengan peta. Berdasarkan peta tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang sebagian besar menjawab perkebunan sawit sebagai mata pencaharian utama dan tidak berdasarkan kecamatan. Kecamatan dengan responden yang sebagian besar menjawab perkebunan sawit sebagai mata pencaharian utama yaitu Kecamatan Tambusai, Kepenuhan, Tambusai Utara, Rambah Hilir, Bangunpurba, Rambah Samo, Rokan IV Koto, dan Kabun. Sedangkan, responden yang sebagian besar menjawab perkebunan sawit bukan sebagai mata pencaharian utama yaitu di Kunto Darussalam, Rambah, Ujungbatu, Tandun, dan Pendalian IV Koto.

Hasil survei menyebutkan bahwa masyarakat, yang mayoritas merupakan petani sawit, merasa bahwa 27 persen responden setuju bahwa hasil dari pertanian sawit telah mampu mencukupi kebutuhan dan 10 persen lainnya



merasa sangat setuju. Sedangkan terdapat 22 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya dan 9 persen menyatakan sangat tidak setuju dan 32 persen responden menyatakan netral.

Berdasarkan Data, tingkat pendapatan responden memiliki persebaran yang tidak merata. Pada rentan pendapatan 200.000 rupiah sampai dengan 2.875.000 rupiah terdapat 65 persen responden. Sebanyak 27 persen responden memiliki pendapatan pada rentan lebih dari 2.875.000 rupiah sampai dengan 5.550.000 rupiah. Semakin tinggi rentang pendapatan, semakin kecil persentasenya.



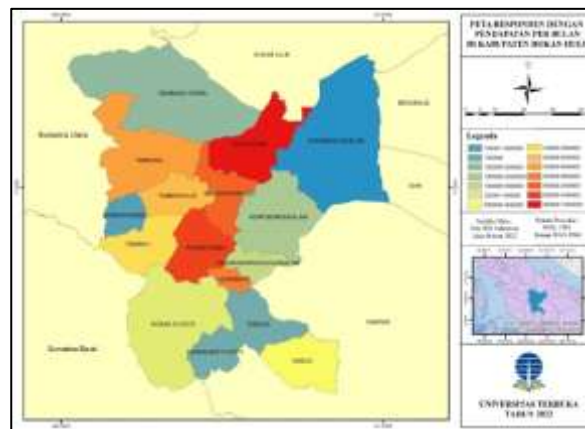
Hal ini menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan yang terjadi pada persebaran pendapatan.

Persebaran pendapatan per bulan responden dapat dilihat melalui Peta Responden dengan Pendapatan Per Bulan di Kabupaten Rokan Hulu. Responden yang menjawab pendapatan per bulan dengan rentang tertinggi yaitu di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar Rp7.000.000,00-Rp30.000.000,00. Sedangkan, responden yang menjawab pendapat per bulan terendah yaitu Rp1000.000,00 yaitu pada Kecamatan Pendalian IV Koto.

Pada rentan pengeluaran 100.000 rupiah sampai 2.587.000 rupiah terdapat 73 persen responden. Sebanyak 21 persen responden memiliki pengeluaran pada rentan 2.587.000 rupiah sampai dengan 5.057.000 rupiah. Pada rentan pengeluaran selanjutnya, persentase responden semakin dimana hal ini juga menunjukkan adanya ketidakmerataan pada persebaran pengeluaran.

Persebaran Peta Responden dengan Pendapatan per Bulan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan angka yang bervariasi pada setiap kecamatan. Kecamatan dengan responden yang menjawab pengeluaran terbanyak yaitu pada Kecamatan Kepenuhan dengan rentang Rp9.000.000,00-Rp150.000.000,00. Sedangkan Kecamatan dengan responden yang menjawab pengeluaran terkecil yaitu Tandun dan Pendalian IV Koto sebesar Rp1.000.000,00.

Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran



Distribusi pendapatan merupakan gambaran pembagian penghasilan dalam masyarakat, hal ini berlaku juga pada distribusi pengeluaran. Indeks gini digunakan untuk mengetahui distribusi pendapatan dan pengeluaran pada masyarakat pemilik perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu.

Indeks Gini Pendekatan Pendapatan 0,81

Indeks Gini Pendekatan Pengeluaran 0,84

Nilai indeks dihitung dengan menggunakan data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang diberikan oleh responden. Berdasarkan hasil pengolahan data untuk indeks gini menyebutkan bahwa masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu memiliki kategori ketimpangan yang tinggi, baik pada penghitungan dengan pendekatan pendapatan maupun pengeluaran. Pendapatan terendah berdasarkan data menunjukkan nominal 200.000 rupiah dan pendapatan tertinggi berada pada angka 21.600.000 rupiah. Pada data pengeluaran responden, pengeluaran terendah bernilai 100.000 rupiah dan pengeluaran tertinggi sebesar 20.000.000 rupiah.

Pendapatan responden menunjukkan besar nilai dengan perbedaan yang signifikan. Hal tersebut juga terjadi pada pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat masyarakat yang memiliki pendapatan dan pengeluaran dengan nilai yang menonjol diantara pendapatan dan pengeluaran masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

Ketimpangan yang terjadi merupakan akibat dari kurang meratanya distribusi pendapatan dan pengeluaran. Dalam hal pendapatan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dalam pengelolaan lahan sawit. Bagi pemilik perkebunan sawit yang mana sekaligus sebagai mata pencaharian utama maka pendapatan sawit menjadi penopang utama perekonomian keluarga. Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga petani sawit dapat meningkatkan pengeluaran dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Kebijakan subsidi dapat dilakukan oleh pemerintah guna membantu peningkatan pendapatan dan membantu pengeluaran rumah tangga petani sawit. Subsidi juga dapat dilakukan pada obat-obatan pendukung, seperti obat untuk hama, vitamin dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rokan Hulu merupakan daerah dengan kawasan lahan perkebunan sawit yang luas. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu menggantungkan kehidupan pada hasil sawit. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas pekerjaan utama masyarakat merupakan petani sawit. Masyarakat menyebutkan bahwa hasil sawit mampu mencukupi kebutuhan hidup serta pengeluaran sehari-hari yang dilakukan. Namun, persebaran



pendapatan dan pendapatan pada masyarakat menunjukkan fenomena ketimpangan yang tinggi. Disparitas yang terjadi dihitung menggunakan indeks gini dengan pendekatan dan pengeluaran. Hasil penghitungan indeks gini yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran menunjukkan adanya ketimpangan dengan skala yang tinggi pada masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

SARAN

Berdasarkan fenomena ketimpangan yang ditemukan dalam penelitian, diharapkan pemerintah dapat turut serta dalam melakukan pemerataan ekonomi pada masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah dapat memberikan berbagai subsidi pupuk dan obat pendukung kepada masyarakat petani sawit dalam upaya untuk mendukung peningkatan panen sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan jaminan berupa standarisasi upah bagi buruh yang bekerja di perkebunan sawit sehingga terjadi pemerataan dan kesejahteraan pada buruh sawit. Kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pemaksimalan lahan serta kemudahan penjualan panen juga diperlukan. Hal tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk pembentukan forum dan penyuluhan secara rutin terhadap para petani. Selain itu, perlunya penetapan harga sawit yang lebih tinggi untuk meminimalkan fluktuasi harga yang dapat merugikan petani sawit. Perlunya standarisasi harga juga meminimalisir adanya kerugian petani sawit akibat rendahnya nilai sawit yang tidak sesuai dengan pengeluaran oleh petani.

REFERENSI

- Abdullahi, M. O. M. (2018). Role of social-demographic and livelihood strategy diversification on pastoralists' household stability in Mandera County, Kenya. *International Journal of Poverty, Investment and Development*, 3(1), 1–19.
- Ayeb-Karlsson, S. (2020). When the disaster strikes: Gendered (im)mobility in Bangladesh. *Climate Risk Management*, 29, 100237.
- Basavaraj, G. G., & Gopalakrishnan, S. (2021). A study on socio-demographic characteristics, morbidity pattern, and health-seeking behaviour of elderly aged in rural area of Puducherry.
- Christian, A. K., Dovie, B. D., Akpalu, W., & Codjoe, S. N. (2021). Households' socio-demographic characteristics, perceived and underestimated vulnerability to floods and related risk reduction in Ghana. *Urban Climate*, 35, 100759.
- Dartanto, T., Yuan, E. Z. W., & Sofiyandi, Y. (2017). *Two decades of structural transformation and dynamics of income equality in Indonesia*.
- Ferreira, J. P., Leeson, G., & Melhado, V. (2021). Ageing in rural Brazil: A socio-demographic analysis of living conditions among black and white women and men. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-259022/v2>
- Gayathri, P., & Arjunan, R. (2010). Socio-Demographic and Quality of Work Life of Tea Plantation Workers in Nilgiris. *Bharathiar University, Coimbatore, Tamil Nadu*.
- Haq, S. M. A., & Ahmed, K. J. (2017). Does the perception of climate change vary with the socio-demographic dimensions? A study on vulnerable populations in Bangladesh. *Nat. Hazards*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11069-016-2664-7>
- Lopez, G. P. R., & San Juan, E. P. (2019). *Socio-economic status and livelihood prospects of solo parents in Catanduanes, Philippines*.



- Mensah, I. (2012). Environmental education and environmentally responsible behaviour: The case of international tourists in Accra hotels. *International Journal of Tourism Sciences*, 12(3), 69–89.
- Muttarak, R., & Lutz, W. (2017). Is education a key to reducing vulnerability to natural disasters and hence unavoidable climate change? *Ecol. Soc.* <https://doi.org/https://doi.org/10.5751/ES-06476-190142>.
- Okumah, M., Ankomah-Hackman, P., & Yeboah, A. S. (2021). Do socio-demographic groups report different attitudes towards water resource management? Evidence from a Ghanaian case study. *GeoJournal*, 86(5), 2447–2456.
- Phillips, A., Khan, A. Z., & Canters, F. (2021). Use-related and socio-demographic variations in urban green space preferences. *Sustainability*, 13(6), 3461.
- Ramadania, R., Rosnani, T., Ratnasari, S. L., Fauzan, R., & Apriandika, M. N. (2023). Towards Organizational Citizenship Behavior and Religious Performance. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 67-81.
- Ratnasari, S. L., Rahmawati, R., Ramadania, R., Darma, D.C., Sutjahjo, G. (2021). Ethical Work Climate In Motivation and Moral Awareness Perspective: The Dilemma by The Covid-19 Crisis? *Public Policy and Administration*. 20 (4), pp. 398-409.
- Ratnasari, S.L., Mahadi, N., Nordin, N.A., Darma, D.C. (2022). Ethical Work Climate, Social Trust, and Decision-Making in Malaysian Public Administration: The Case of MECD Malaysia. *Croatian and Comparative Public Administration*, 2022, 22(2), pp. 289–312
- Ryan, A., Christofa, E., Barchers, C., & Knodler, M. (2021). The relationship between municipal highway expenditures and socio-demographic status: Are safety investments equitably distributed? *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 9, 100321.
- Sadekin, M. N., Ali, J., & Islam, R. (2018). The socio demographic status of small scale fishers of inland open water area: A case study from chalanbeel area of Bangladesh. *International Journal of Engineering & Technology (UAE)*, 7(4.28), 305–311.
- Ullah, S., Noor, R. S., Abid, A., Mendako, R. K., Waqas, M. M., Shah, A. N., & Tian, G. (2021a). Socio-economic impacts of livelihood from fuelwood and timber consumption on the sustainability of forest environment: Evidence from basho valley, Baltistan, Pakistan. *Agriculture*, 11(7), 596.
- Ullah, S., Noor, R. S., Abid, A., Mendako, R. K., Waqas, M. M., Shah, A. N., & Tian, G. (2021b). Socio-economic impacts of livelihood from fuelwood and timber consumption on the sustainability of forest environment: Evidence from basho valley, Baltistan, Pakistan. *Agriculture*, 11(7), 597.
- Watete, P. W., Makau, W. K., Njoka, J. T., AderoMacOpiyo, L., & Mureithi, S. M. (2016). Are there options outside livestock economy? Diversification among households of northern Kenya. *Pastoralism*, 6(1), 3.